

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya semua kebutuhan kehidupan manusia dalam sandang, papan, pangan. Seluruh umat manusia ingin menjadi sejahtera akan tetapi bukan hal yang mudah untuk mencapai kesejahteraan, butuh usaha kerja keras di berbagai pihak seperti pemerintah, orangnya itu sendiri dan masyarakat lingkungan sekitarnya.

Kehidupan di dunia ini diatur oleh seorang pemimpin agar tidak terjadi perpecahan dan dapat terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, di seluruh negara memiliki pemimpin. Tujuan dari pemimpin negara itu terutama di Indonesia yaitu salah satunya ingin mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi tidak semua rakyatnya dapat diatur dengan baik karena kembali kepada individu nya masing-masing. Hanya saja banyak sekali hambatan di Indonesia dalam mencapai kesejahteraan salah satunya dalam pemberantasan kemiskinan, karena kemiskinan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Indonesia adalah Negara yang berada di Asia Tenggara dan salah satu menjadi penduduk terbanyak di ASEAN, tentu bukan hal yang mudah untuk dapat mengatur penduduknya yang banyak.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonominya sebesar -2,07%. Angka minus ini diakibatkan karena wabah

penyakit covid-19 yang merajalela di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi di beberapa negara lainnya pun mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya. Hal ini hanya menambah permasalahan di Indonesia seperti pengangguran juga yang semakin banyak karena perusahaan banyak yang mengalami kerugian. Akibatnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-harinya, sehingga kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menurut Tambunan pada tahun 2001 mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena pada saat pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah orang miskin akan turun.

Menurut Supriatna pada tahun 1997 mengatakan bahwa “kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal”.

Menurut Todaro,(2000) mengatakan bahwa pandangan ekonomi baru menganggap bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, akan tetapi pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal ini dapat dimaknai bahwa kemiskinan

menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, akan tetapi melalui kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Tantangan terbesar yang masih menjadi masalah yaitu kemiskinan. Kemiskinan selalu dihadapi di negara maju maupun negara berkembang dari zaman ke zaman.

Pemerintah negara di belahan dunia khususnya Indonesia menjadikan kemiskinan suatu permasalahan prioritas yang harus di selesaikan karena merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun. Beberapa kebijakan-kebijakan Pemerintah domestik telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memberikan suatu dorongan terhadap sektor-sektor padat kerja agar sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja.

Suatu wilayah atau negara khususnya di Indonesia dikatakan tidak akan makmur karena keberadaan penduduk miskin sehingga wajib diberantas. Tidak ada penduduk yang bahagia dan makmur, apabila sebagian besar penduduknya berada dalam kesengsaran dan kemiskinan(Todaro,2004). Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang cukup serius dan harus diselesaikan dalam melakukan pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi juga salah satu cara dalam mengurangi kemiskinan.

Menurut (Muttaqien,2006:3) mengatakan bahwa kemiskinan menyebabkan efek yang hampir sama di setiap negara, salah satunya menyebabkan hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin (sandang, papan, dan pangan). Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Permasalahan di negara berkembang termasuk Indonesia yaitu terkait dengan masalah inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Tujuan dari kebijakan utama di negara-negara berkembang yaitu pengentasan kemiskinan (Cuong, 2011).

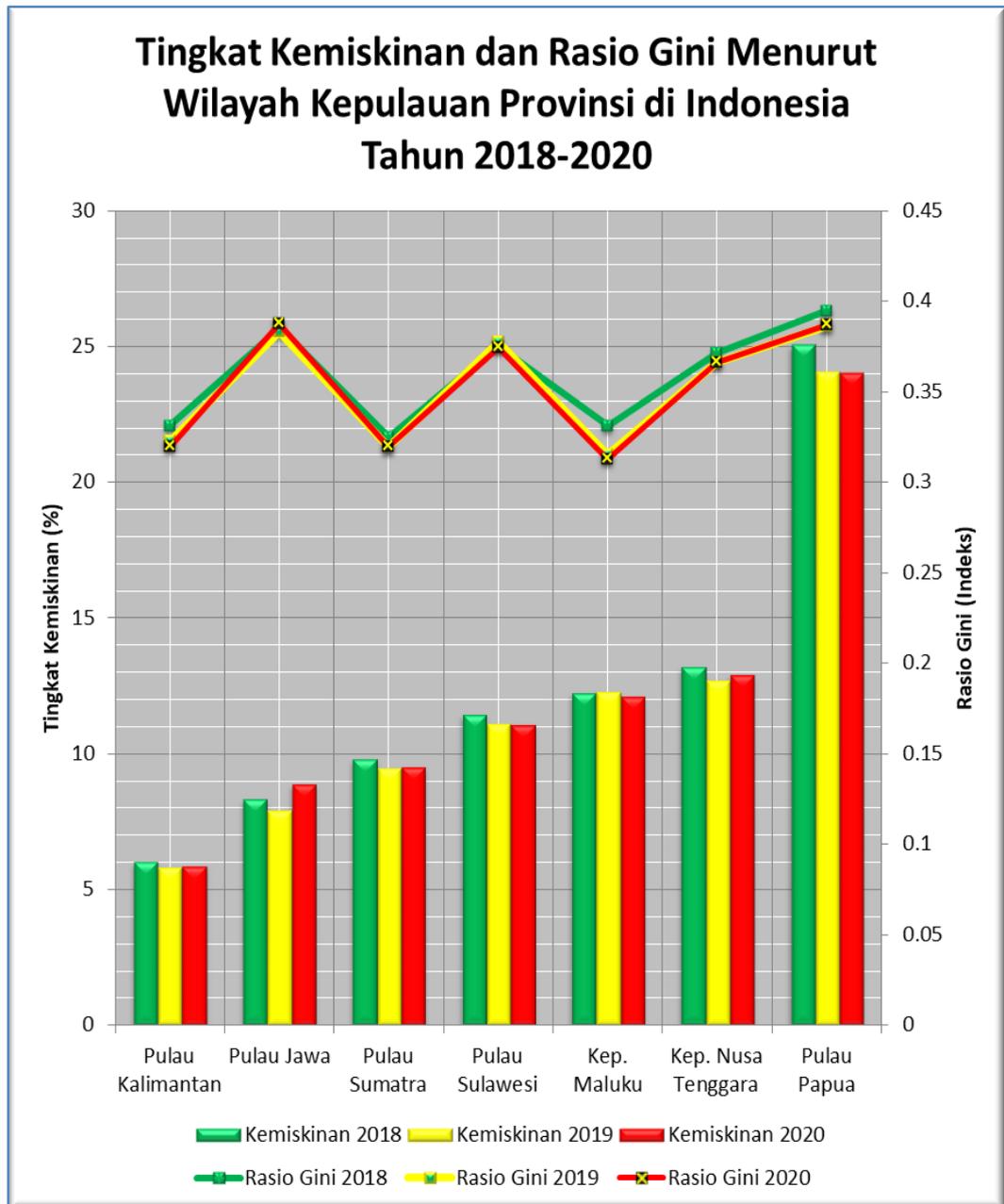
Menurut Todaro dan Smith (2006: 232) dalam Martiyan “tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu Negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah.

Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika rata-rata tingkat pendapatan perkapita rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas”. Kesenjangan antara kemiskinan dan kekayaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada masyarakat dengan kekayaan yang berlimpah, akan tetapi masih tinggi nya angka rasio gini, maka tetap bahwa suatu wilayah tersebut belum bisa dikatakan makmur dan sejahtera.

Ketimpangan sendiri masih banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jika akses kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan belum merata, maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang tinggi. Infrastruktur di wilayah Indonesia belum merata, masih banyak wilayah yang memiliki akses jalan yang kurang baik, sehingga menyebabkan perekonomian di daerahnya sedikit terhambat.

Kemiskinan saling dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, karena arti dari ketimpangan pendapatan sendiri yaitu perbedaan yang sangat tinggi antara tingkat pendapatan setiap individu di suatu wilayah. Wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki jenjang pendapatan yang berbeda karena gaya hidup serta produktivitas masing-masing individu juga berbeda.

Ketimpangan pendapatan lebih besar di wilayah perkotaan karena banyak masyarakat pedesaan yang bermigrasi mencari pendapatan yang lebih baik ke daerah-daerah lain (perkotaan), akan tetapi individu tersebut tidak cukup untuk memiliki skill yang mumpuni untuk masuk ke dunia angkatan kerja di perkotaan, sehingga hanya menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran.



Sumber :BPS (Badan Pusat Statistik)2018-2020

Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Menurut Wilayah Kepulauan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020

Dapat dilihat pada grafik 1.1 diatas yang memperlihatkan persentase penduduk miskin yang diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi dan rasio gini menurut wilayah kepulauan di Indonesia tahun 2018-2020. Pada tingkat kemiskinan yang rendah indeks gini juga rendah di beberapa kepulauan provinsi, lalu ketika tingkat kemiskinan tinggi, maka indeks gini memiliki angka yang tinggi. Akan tetapi, tingkat kemiskinan yang tinggi juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak, dan akan meningkatkan ketimpangan di suatu wilayah tersebut terutama wilayah perkotaan.

Tingkat kemiskinan dan rasio gini mengalami penurunan di tahun 2018 hingga 2019 akan tetapi tidak dengan tahun 2020 karena adanya wabah covid 19 yang merajalela sehingga mematikan perekonomian. Kepulauan yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi ditempati oleh pulau Papua dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 persentase kemiskinannya sebesar 24,01% dan indeks gini nya 0,387. Akan tetapi angka yang terbesar di Indonesia berada di Provinsi Papua untuk tingkat kemiskinan dan terbesar ke dua untuk indeks gini.

Kepala BPS Provinsi Papua yang mengatakan bahwa minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyebab kemiskinan. Maka diperlukan data yang akurat untuk membangun masyarakat Papua. Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan barometer BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan orang atau keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya inilah yang membuat orang/keluarga bisa keluar dari garis

kemiskinan(Johanes,2016). Ketimpangan di Kepulauan ini terjadi karena masyarakat yang masih banyak mencari makan serta rezeki dengan cara tradisional seperti berkebun, berburu, dan berladang, sedangkan pada masyarakat kaya kebanyakan para petinggi Pemerintahan di sana yang memiliki pendapatan tinggi dan para pengusaha minyak serta pertambangan. Sehingga terjadi ketimpangan yang sangat tinggi.

Persentase kemiskinan yang paling kecil berada di Pulau Kalimantan rata-rata sebesar 5,85% di tahun 2020 dengan indeks gini sebesar 0,319. Hal ini disebabkan oleh masih sedikit jumlah penduduk yang menetap disana, dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan indeks gini juga sedikit sedang. Lalu Provinsi yang paling rendah persentasenya berada di Provinsi Bali sebesar 3,78% di tahun 2020 dengan nilai indeks gini 0,369. Karena Provinsi ini memiliki lapangan kerja yang cukup banyak, lalu para wirausaha yang berkembang di Bali seperti bidang fashion dan hotel, dapat kita ketahui Bali adalah salah satu wisata di Indonesia yang paling terkenal, yang dapat dimanfaatkan oleh warga lokal untuk mencari pundi-pundi rupiah. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadinya ketidakmerataan antara pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang ada di Provinsi seluruh Indonesia.

Angka rata-rata rasio gini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa rasio gini di Indonesia dikategorikan ketimpangan sedang karena nilai indeks gini kurang dari 0,5 dan diatas 0,3. Indeks gini yang memiliki nilai paling besar berada di Pulau Jawa pada tahun 2020 sebesar 0,388 hal ini dapat disebabkan oleh penduduk yang notabennya paling

besar berada di Pulau Jawa, karena banyak sekali penduduk dari luar pulau untuk melakukan imigrasi ke Pulau Jawa dalam mencari nafkah, akan tetapi ketika berada di Kepulauan Jawa, banyak yang tidak dapat memasuki dunia kerja, karena dibutuhkan skill yang cukup tinggi, dan akhirnya hanya menjadi pengangguran dan meningkatkan rasio indeks gini, antara kemiskinan dan kekayaan di Pulau ini.

Provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu DI Yogyakarta sebesar 0,434. Kep. Bangka Belitung yang memiliki rasio gini paling kecil karena menurut Pemprovnya “selalu mengutamakan pemerataan ekonomi dengan cara memberdayakan kemampuan ekonomi lokal dari masyarakat, seperti memajukan warung-warung dan UKM ketimbang waralaba”.

Berbeda hal dengan DI Yogyakarta yang memiliki angka rasio gini tertinggi. Menurut Bhima Yudhistira “karena di Provinsi ini sangat banyaknya mall-mall yang diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas. Lalu izin bangunan mall dan hotel disana sangatlah mudah, untuk kalangan menengah keatas mereka ingin mengikuti gaya hidup seperti kota-kota besar lainnya sedangkan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah mereka tetap dengan gaya hidupnya yang sederhana.

Distribusi pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang tidak produktif lalu ketimpangan pembangunan antar daerah yang dirasa masih sangat tidak merata di setiap wilayah di Indonesia.

Masyarakat pedesaan cenderung lebih banyak berprofesi sebagai petani dan cenderung pendapatannya tidak stabil. Mobilitas yang berbeda juga antara di pedesaan dan perkotaan menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan, di pedesaan bisa hidup tanpa menggunakan uang karena masih bisa mengkonsumsi dari pohon-pohon maupun tumbuh-tumbuhan, hal ini berbeda dengan di perkotaan yang mana harus segalanya menggunakan uang untuk dapat mengkonsumsi dan dapat bertahan hidup.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan penting untuk mengentaskan kemiskinan seperti bansos, BLT, PKH serta program-program lainnya, lalu efek dari kebijakan serta program pemerintah ini masih dirasa belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Setiap tahun persentase kemiskinan semakin berkurang akan tetapi, di beberapa Provinsi pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan jumlah kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan adanya wabah covid-19 ini yang dapat memperlambat lajur perekonomian di Indonesia sehingga pemerintah melakukan kebijakan lockdown selama 14 hari yang berakibat terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan banyak pihak seperti para pelaku usaha.

Pengusaha yang berada di Indonesia pun melakukan pemberhentian kerja terhadap sebagian besar karyawan karena kerugian yang dialaminya sehingga memperbanyak pengangguran yang berakibat pada kenaikan kemiskinan.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dilandasi oleh pertumbuhan perekonomian daerah. Di provinsi atau daerah pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Sasaran dari pembangunan ialah menurunkan jumlah kemiskinan. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Sukirno,2005) bahwa pertumbuhan ekonomi ialah syarat keharusan bagi penurunan kemiskinan. Syarat keharusan dalam mengurangi kemiskinan ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Adanya kenaikan/pertumbuhan ekonomi yang positif berarti ada peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Dalam meningkatkan produksi yang berarti ada peningkatan upah atau peningkatan tenaga kerja yang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga maka dari itu pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010). Dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi di provinsi Indonesia dari PDRB atas dasar harga konstan. Lalu, untuk melihat kinerja perekonomian secara keseluruhan salah satunya dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut kepulauan Provinsi di Indonesia, berikut dibawah ini grafik PDRB kepulauan Provinsi di Indonesia atas dasar harga konstan :



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Grafik 1.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Kepulauan Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020

Dapat dilihat pada gambar grafik 1.2 menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan wilayah kepulauan provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 yang diurutkan dari kepulauan PDRB terbesar ke yang terkecil, PDRB di wilayah kepulauan Indonesia memberikan suatu gambaran informasi pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga PDRB atas dasar konstan ini dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

PDRB atas dasar harga konstan wilayah kepulauan provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan angka yang sangat besar di pulau Jawa karena jumlah penduduk terpadat di Indonesia berada

di pulau ini. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2019 ke tahun 2020 hampir seluruh wilayah kepulauan di Indonesia menurun karena diakibatkan oleh wabah covid yang mematikan perekonomian wilayah provinsi di Indonesia dampaknya juga terhadap pertumbuhan ekonomi yang defisit di tahun 2020.

PDRB di pulau Jawa tahun 2019 mencapai 6.530.684,05 Milyar rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 6.367.053,87 Milyar rupiah, dapat dikatakan terjadi penurunan yang cukup tinggi berbeda halnya dengan pulau Papua yang mengalami peningkatan dari 196.634,99 Milyar rupiah tahun 2019 dan 199.269,96 Milyar rupiah tahun 2020, hal ini disebabkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

PDRB di wilayah Indonesia memiliki angka yang cukup besar dibandingkan Negara Asia Tenggara lainnya bahkan di Dunia. Pada tahun 2019 menurut CNBC bahwa Indonesia menempati urutan ke 7 terbesar di Dunia, hanya saja tidak sebanding dengan pendapatan perkapita nya karena jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan Negara Indonesia memiliki angka PDB yang sangat tinggi, hal ini menjadi permasalahan di Negara ini terutama pendapatan perkapita yang masih tergolong rendah dan tidak merata yang menjadikan masyarakat Indonesia tergolong kedalam masyarakat menengah kebawah sehingga masih banyaknya masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan.

Menurut Subandi pada tahun 2012 mengatakan bahwa “pembangunan dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu upaya dalam memberantas kemiskinan”. Beberapa cara dalam melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan gizi, dan merupakan salah satu kebijakan dari government dalam mengentaskan kemiskinan & memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk.

Pembangunan penduduk sendiri bisa dihitung oleh *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat diartikan sebagai suatu indikator penting dalam mengukur seberapa besar keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas suatu penduduk/masyarakatnya. Menurut Todaro pada tahun 2006 mengemukakan bahwa “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan pemerataan dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat”.

Semakin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, maka dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pekerjaan sehari-hari dari masyarakat menurun. Penurunan produktivitas kerja akan menyebabkan penurunan juga terhadap penghasilan yang didapatkan, lalu ketika pendapatan yang dihasilkan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari maka menimbulkan pertumbuhan kemiskinan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Indonesia merancang suatu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut kementerian sosial Republik Indonesia PKH adalah “program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”.

PKH yang ditujukan untuk keluarga yang berpenduduk miskin terutama ibu hamil serta anak untuk bisa diberikan beberapa “fasilitas pelayanan kesehatan” (faskes) serta “fasilitas layanan pendidikan” (fasdik) yang terdapat di wilayah terdekat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia yang diinginkan oleh Pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia.

Bertambahnya angka kemiskinan pada tahun 2020 membuat pemerintah memberikan perhatian lebih dalam upaya pengentasan kemiskinan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan alangkah baiknya perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan di Indonesia antara lain (1) Rasio Gini; (2) Pertumbuhan Ekonomi; dan (3) Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan paparan diatas bahwa kemiskinan menjadi masalah utama di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mengutamakan dalam pengentasan kemiskinan. Dan menurut teori para ahli serta uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas dapat dikatakan bahwa masih adanya kemiskinan di Provinsi wilayah Indonesia serta terdapat korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan rasio gini; jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi; jumlah penduduk miskin dengan indeks pembangunan

manusia. Maka penulis ingin meneliti terkait **“Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 – 2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi di beberapa Provinsi.
2. Masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antara di Provinsi Jawa dan Provinsi lainnya.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata disetiap provinsi merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan mengukur tinggi rendahnya kemiskinan.
4. Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang tidak merata di berbagai Provinsi di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin, rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2020?

2. Bagaimana pengaruh rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dan penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, khususnya mahasiswa Universitas Pasundan.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang perekonomian serta dapat memahami dan mengetahui hasil – hasil dari faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di indonesia.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/acuan bagi para pembaca khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama terhadap mahasiswa Universitas Pasundan.

1.6 Batasan Penelitian

Variabel bebas (Independen) yang diteliti adalah rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Serta variabel tidak bebas (Dependen) yaitu jumlah penduduk miskin. Sampel yang diambil dari BPS pusat dengan data wilayah provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi dan rentang waktu dari 2010 hingga tahun 2020. Lalu, bagaimana pengaruhnya dari variabel independen (rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan IPM) terhadap jumlah penduduk miskin (variabel dependen).